



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	1.010.040.000,00	896.140.000,00	88,72	826.840.000,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.010.040.000,00	896.140.000,00	88,72	826.840.000,00
3	Pajak Daerah				
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)				
7	Pajak Air Permukaan				
8	Pajak Rokok				
9	Pajak Alat Berat				
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
12	Retribusi Daerah	1.010.040.000,00	896.140.000,00	88,72	826.840.000,00
13	Retribusi Jasa Umum				
14	Retribusi Jasa Usaha	1.010.040.000,00	896.140.000,00	88,72	826.840.000,00
15	Retribusi Perizinan Tertentu				
16	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN				
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
19	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				
20	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
21	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				
22	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan				
23	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
24	Hasil Kerja Sama Daerah				
25	Jasa Giro				
26	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
27	Pendapatan Bunga				
28	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				
29	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				
30	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing				
31	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
32	Pendapatan Denda Pajak Daerah				
33	Pendapatan Denda Retribusi Daerah				
34	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
35	Pendapatan dari Pengembalian				
36	Pendapatan BLUD				
37	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan				
38	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				
39	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
40	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)				
41	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah				
42	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf				
43	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak				
44	Pungutan bagi Wisatawan Asing				
45	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah				
46	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.010.040.000,00	896.140.000,00	88,72	826.840.000,00
47					
48	PENDAPATAN TRANSFER				
49	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
50	Dana Perimbangan				
51	Dana Insentif Daerah (DID)				
52	Insentif Fiskal				
53	Dana Bagi Hasil (DBH)				
54	Dana Alokasi Umum (DAU)				
55	Dana Alokasi Khusus (DAK)				
56	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
57	Pendapatan Bagi Hasil				
58	Bantuan Keuangan				
59	Jumlah Pendapatan Transfer				
60					
61	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
62	Pendapatan Hibah				
63	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
64	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				
65	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri				
66	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
67	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
68	Dana Darurat				
69	Dana Darurat				
70	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
71	Lain-lain Pendapatan				
72	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
73	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara				
74	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat				
75	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
76					
77	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.010.040.000,00	896.140.000,00	88,72	826.840.000,00
78					
79	BELANJA DAERAH	640.487.566.000,00	615.983.500.637,00	96,17	656.153.301.617,00
80	BELANJA OPERASI	628.542.066.000,00	604.331.779.535,00	96,15	637.319.365.175,00
81	Belanja Pegawai	123.537.963.000,00	110.022.961.259,00	89,06	109.202.844.869,00
82	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	39.323.494.000,00	37.173.574.950,00	94,53	35.724.187.717,00
83	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	51.869.339.000,00	50.704.517.703,00	97,75	48.295.141.298,00
84	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.816.740.000,00	2.033.783.716,00	72,20	1.481.055.950,00
85	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
86	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.203.094.000,00	983.377.690,00	44,64	204.972.404,00
87	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	27.325.296.000,00	19.127.707.200,00	70,00	23.497.487.500,00
88	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP				
89	Belanja Pegawai BOS				
90	Belanja Pegawai BOSP				
91	Belanja Pegawai BLUD				
92	Belanja Barang dan Jasa	99.258.603.000,00	95.755.318.276,00	96,47	105.889.105.306,00
93	Belanja Barang	18.362.779.000,00	18.201.666.936,00	99,12	18.312.719.116,00
94	Belanja Jasa	43.002.925.000,00	41.548.352.528,00	96,62	47.865.333.249,00
95	Belanja Pemeliharaan	8.798.595.000,00	8.592.928.731,00	97,66	10.355.794.179,00
96	Belanja Perjalanan Dinas	29.033.354.000,00	27.362.320.081,00	94,24	29.325.433.762,00
97	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.950.000,00	50.050.000,00	82,12	29.825.000,00
98	Belanja Barang dan Jasa BOP				
99	Belanja Barang dan Jasa BOS				
100	Belanja Barang dan Jasa BOSP				
101	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas				
102	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
103	Belanja Bunga				
104	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat				
105	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain				
106	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
107	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
108	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)				
109	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD				
110	Belanja Subsidi				
111	Belanja Subsidi kepada BUMN				
112	Belanja Subsidi kepada BUMD				
113	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta				
114	Belanja Subsidi kepada Koperasi				
115	Belanja Hibah	405.745.500.000,00	398.553.500.000,00	98,23	422.227.415.000,00
116	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	304.450.000.000,00	304.450.000.000,00	100,00	304.470.150.000,00
117	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
118	Belanja Hibah kepada BUMN				
119	Belanja Hibah kepada BUMD				
120	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	101.295.500.000,00	94.103.500.000,00	92,90	117.757.265.000,00
121	Belanja Hibah Dana BOS				
122	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
123	Belanja Hibah Dana BOSP				
124	Belanja Bantuan Sosial				
125	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
126	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
127	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
128	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
129	Jumlah Belanja Operasi	628.542.066.000,00	604.331.779.535,00	96,15	637.319.365.175,00
130					
131	BELANJA MODAL	11.945.500.000,00	11.651.721.102,00	97,54	18.833.936.442,00
132	Belanja Modal Tanah				
133	Belanja Modal Tanah				
134	Belanja Modal Tanah BLUD				
135	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.945.500.000,00	11.651.721.102,00	97,54	18.833.936.442,00
136	Belanja Modal Alat Besar				
137	Belanja Modal Alat Angkutan	5.310.000.000,00	5.255.800.000,00	98,98	10.469.893.000,00
138	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				3.400.000,00
139	Belanja Modal Alat Pertanian				-
140	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.947.503.000,00	3.813.679.802,00	96,61	2.953.234.432,00
141	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.442.579.000,00	1.387.840.500,00	96,21	3.485.072.010,00
142	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
143	Belanja Modal Alat Laboratorium				
144	Belanja Modal Alat Persenjataaan				
145	Belanja Modal Komputer	1.245.418.000,00	1.194.400.800,00	95,90	1.922.337.000,00
146	Belanja Modal Alat Eksplorasi				
147	Belanja Modal Alat Pengeboran				
148	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
149	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				
150	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja				
151	Belanja Modal Alat Peraga				
152	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi				
153	Belanja Modal Rambu-rambu				
154	Belanja Modal Peralatan Olahraga				
155	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
156	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP				
157	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
158	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
159	Belanja Modal Bangunan Gedung				
160	Belanja Modal Monumen				
161	Belanja Modal Bangunan Menara				
162	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti				
163	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
164	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
165	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
166	Belanja Modal Bangunan Air				
167	Belanja Modal Instalasi				
168	Belanja Modal Jaringan				
169	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD				
170	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
171	Belanja Modal Bahan Perpustakaan				
172	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga				
173	Belanja Modal Hewan				
174	Belanja Modal Biota Perairan				
175	Belanja Modal Tanaman				
176	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya				
177	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi				
178	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
179	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
180	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP				
181	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD				
182	Belanja Modal Aset Lainnya				
183	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud				
184	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				
185	Jumlah Belanja Modal	11.945.500.000,00	11.651.721.102,00	97,54	18.833.936.442,00
186					
187	BELANJA TIDAK TERDUGA				
188	Belanja Tidak Terduga				
189	Belanja Tidak Terduga				
190	Jumlah Belanja Tidak Terduga				
191					
192	BELANJA TRANSFER				
193	Belanja Bagi Hasil				
194	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
195	Belanja Bantuan Keuangan				
196	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
197	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
198	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
199	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
200	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
201	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota				
202	Jumlah Belanja Transfer				
203					
204	JUMLAH BELANJA DAERAH	640.487.566.000,00	615.983.500.637,00	96,17	656.153.301.617,00
205					
206	SURPLUS/DEFISIT	(639.477.526.000,00)	(615.087.360.637,00)	96,19	(655.326.461.617,00)
207					
208	PEMBIAYAAN DAERAH				
209	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
210	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
211	Pelampauan Penerimaan PAD				
212	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer				
213	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
214	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan				
215	Penghematan Belanja				
216	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan				
217	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan				
218	Sisa Belanja Lainnya				
219	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				
220	Pencairan Dana Cadangan				
221	Pencairan Dana Cadangan				
222	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
223	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)				
224	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
225	Penerimaan Pinjaman Daerah				
226	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat				
227	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain				
228	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
229	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
230	Pinjaman Daerah dari Masyarakat				

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
231	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
232	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat				
233	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
234	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD				
235	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN				
236	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi				
237	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat				
238	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD				
239	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
240	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD				
241	Divestasi BLUD				
242	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah				
243	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat				
244	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
245					
246	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
247	Pembentukan Dana Cadangan				
248	Pembentukan Dana Cadangan				
249	Penyertaan Modal Daerah				
250	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)				
251	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
252	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
253	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat				
254	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
255	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
256	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
257	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat				
258	Pemberian Pinjaman Daerah				
259	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat				
260	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
261	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD				
262	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN				
263	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi				
264	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat				
265	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD				
266	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
267	Pinjaman BLUD				
268	Investasi BLUD				
269	Pembentukan Dana Abadi Daerah				
270	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah				
271	Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah				
272	Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat				
273	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
274					
275	PEMBIAYAAN NETTO				
276					
277	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(639.477.526.000,00)	(615.087.360.637,00)	96,19	(655.326.461.617,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

